



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

# MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

## Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 2464–2470

### Kepemimpinan Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Era Digital

Indi Juniartri Cahya Ningrum, Eli Apud Saepudin, Firya Al Nabillah,  
Nadiyah Miftahul Rohmah, Dian Maharani Putri

Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina  
Bangsa, Serang, Indonesia

#### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2876>

#### How to Cite this Article

APA : Juniartri, I., Apud Saepudin, E., Al Nabillah, F., Miftahul Rohmah, N., & Maharani Putri, D. (2025). Kepemimpinan Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Era Digital. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2464 – 2470. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2876>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

## Kepemimpinan Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Era Digital

Indi Juniartri Cahya Ningrum<sup>1</sup>, Eli Apud Saepudin<sup>2</sup>, Firya Al Nabillah<sup>3</sup>, Nadiah Miftahul Rohmah<sup>4</sup>, Dian Maharani Putri<sup>5</sup>

Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email Korespondensi: indijuniartricahyaningrum@gmail.com

Diterima: 11-01-2025

| Disetujui: 12-01-2025

| Diterbitkan: 13-01-2025

### ABSTRACT

*This research analyzes the role of political leadership in public policy formation in the digital era. Digital transformation brings significant changes in the policy-making and implementation process, with technology enabling faster data collection and more effective communication between leaders and the public. Political leaders are now using digital platforms to increase public participation and transparency, and implementing data-driven policy approaches for more accurate decision-making. However, digitalization also poses challenges, such as privacy issues, data security, and the spread of disinformation, which affect public perception of policies. This analysis shows that successful political leadership in the digital era requires adaptation to technological developments, the ability to manage digital communications, and a commitment to maintaining public engagement in the policy process. Thus, the ability of leaders to harness the potential of digitalization can strengthen the effectiveness of public policies and address the needs of society in a more responsive and inclusive manner.*

**Keywords:** Data, Digital era, Public policy, Leadership.

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran kepemimpinan politik dalam pembentukan kebijakan publik di era digital. Transformasi digital membawa perubahan signifikan dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, dengan teknologi yang memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan komunikasi yang lebih efektif antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin politik kini menggunakan platform digital untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, serta menerapkan pendekatan kebijakan berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan, seperti isu privasi, keamanan data, dan penyebaran disinformasi, yang memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan yang dibuat. Analisis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik yang sukses di era digital memerlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kemampuan mengelola komunikasi digital, dan komitmen untuk menjaga keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Dengan demikian, kemampuan pemimpin untuk memanfaatkan potensi digitalisasi dapat memperkuat efektivitas kebijakan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih responsif dan inklusif.

**Katakunci:** Data, Era digital, Kebijakan publik, Kepemimpinan.

## PENDAHULUAN

Era digital yang ditandai dengan penggunaan teknologi internet yang sangat masif saat ini menimbulkan perubahan yang tidak terduga dan sulit ditebak arahnya. Para ahli mengatakan terjadi “gangguan” (disruption) pada kehidupan umat manusia. Perubahan yang terjadi berangkat dari pemikiran orang atau orang-orang. Oleh karena itu, Shaw mengingatkan bahwa “Those who cannot change their minds cannot change anything.”<sup>2</sup> Mereka yang tidak dapat mengubah pola pikirnya tidak akan dapat mengubah apa pun karena perubahan diawali dari perubahan cara berpikir. (Fachrusi, 2023).

Di bidang politik, internet menciptakan partisipasi aktif antar pemerintah dan warga negara. Internet menjadi alternatif saluran komunikasi untuk negara dan masyarakat yang sudah maju dalam aspek sumber daya informasi (Norris, P., 2001). Teknologi internet telah menjadi sumber informasi peradaban saat ini. Dijk, V. (2006) menjelaskan, teknologi memang memungkinkan distribusi pengetahuan yang lebih baik. Kehadiran internet juga memungkinkan meningkatkan partisipasi masyarakat, memobilisasi jaringan komunitas dan koalisi serta lobi politik. (Hidayati, 2021).

Saat ini, internet (bersama dengan munculnya media digital) mempengaruhi segalanya mulai dari cara kita berbelanja, membaca berita, dan menjalani kehidupan sehari-hari hingga cara bisnis, parlemen, dan pemerintah, sehingga mengubah tatanan sosial, institusi politik, dan ekonomi. Transformasi digital ini telah menciptakan tantangan dan peluang baru bagi politisi, jurnalis, institusi politik, dan media untuk menghubungkan kembali dan terlibat dengan warganya. Media sosial menghadirkan struktur peluang politik baru (Schwanholz J. & Graham T, 2018).

Kemajuan teknologi informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat saat ini. Laju informasi dan pengetahuan pun bergerak begitu cepat tanpa kendala. Mulai dari proses penggalian informasi, penyebaran berita, tren, teknologi hingga berbagai produk terbaru dan memiliki fitur-fitur canggih terjadi sangat cepat. Seakan mereka yang bergerak lambat akan tergilas dan tertinggal jauh di belakang. Sebagai bangsa yang besar dan semakin diperhitungkan bergantung satu sama lain dalam berbagai hal, seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan, Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus diselesaikan. Membangun Indonesia berarti membangun mental rakyatnya sehingga gagasan revolusi mental pun lahir dan dicetuskan pemerintah sebagai gerakan yang luas. (Peramesti & Kusmana, 2018)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksploratif untuk menggali dan memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam aktivitas politik melalui platform digital. Fokus utama adalah pada bagaimana teknologi mempengaruhi pola partisipasi politik dan bagaimana individu serta kelompok merespons perubahan ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai partisipan yang terlibat dalam aktivitas politik digital, seperti aktivis, anggota organisasi politik, pengguna media sosial, dan pengamat politik. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengalaman pribadi mereka, motivasi, serta tantangan yang dihadapi dalam berpartisipasi secara digital. (Ashariani, 2024)

Tahap awal mencakup seleksi literatur dari buku dan jurnal nasional/internasional yang relevan dengan komunikasi politik, media sosial, dan peran platform digital dalam membentuk opini publik. Selanjutnya, dilakukan review literatur sistematis untuk merangkum metodologi, temuan, dan interpretasi penelitian terdahulu, diikuti oleh analisis konseptual terhadap konsep-konsep kunci. Identifikasi metodologi penelitian terdahulu dan penyusunan kerangka konseptual akan menjadi langkah terakhir dalam

membangun dasar teoretis dan metodologis penelitian ini, menciptakan landasan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. (Arsyad Arsyad et al., 2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam dinamika opini publik dan partisipasi politik di era digital. Beberapa peran tersebut melibatkan perubahan cara orang berkomunikasi, mendapatkan informasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Berikut adalah beberapa aspek peran media sosial dalam konteks ini:

1. Informasi yang cepat dan dapat diandalkan Media sosial memungkinkan informasi dibagikan dengan cepat dan mudah. Informasi politik dapat ditemukan dalam hitungan detik, sehingga masyarakat dapat mengakses berita terkini dan berpartisipasi dalam perkembangan politik secara real-time. Seiring dengan perkembangan media massa yang terus berkembang, media massa memberikan kita kemampuan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi, mulai dari artikel berita hingga berita terbaru tentang situasi atau fenomena sosial. Beberapa sistem yang kini hadir di media dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku individu maupun kolektif.

2. Media sosial mendorong demokratisasi informasi dengan memberi orang kesempatan untuk berbicara dan berbagi pendapat mereka. Ini juga memberi masyarakat kesempatan untuk mendengar suara yang sebelumnya mungkin tidak terdengar oleh media konvensional. Semua orang memiliki kemampuan untuk membuat konten dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Pengembangan teknologi informasi juga mengubah cara orang berkomunikasi. Penggunaan media konvensional, yang meliputi media elektronik dan cetak, kini beralih ke media sosial, yang berbasis internet dan digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi politik selama pemilihan umum. (Juleha et al., 2024)

Untuk meningkatkan kualitas hidup organisasi, baik pemerintahan maupun privat, kebijakan publik biasanya digunakan. Karena kepentingan, kebijakan harus bebas dari arti atau makna politis. Studi ini menunjukkan bahwa masih ada orang yang belum menjalankan kebijakan pemerintah, belum berpartisipasi secara aktif dalam mengusulkan atau menyarankan kebijakan publik yang berbeda dari yang ada saat ini, dan masih ada orang yang merasa kebijakan publik saat ini memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, diskusi tentang masalah publik tidak akan habis. Pihak-pihak yang berkepentingan—juga dikenal sebagai stakeholder—dipaksa untuk menyuarakan pendapat mereka dan "menitipkan" kepentingan mereka. Karena banyaknya kepentingan yang masuk, para pembuat kebijakan sibuk membuat kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor harus memilih masalah masing-masing. Membuat kebijakan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif membutuhkan waktu dan tenaga tambahan. Setiap kebijakan yang dibuat sebagai hasil dari evaluasi masalah publik.

Kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Selain itu, kebijakan publik dibuat jika pemerintah merasa perlu mengatur masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Aturan-aturan ini disusun dan disetujui oleh pemerintah yang berwenang dan dikenal sebagai kebijakan publik.

Kebijakan publik dibuat oleh otoritas politik yang berwenang, yang dipilih oleh rakyat dan bertindak sebagai perwakilan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan publik yang dibuat harus mencerminkan



aspirasi dan kehendak rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik juga dapat digunakan sebagai ukuran seberapa patuh negara terhadap amanah yang diberikan kepadanya oleh rakyatnya. Seperti halnya kebijakan pendidikan berbasis digital, penetapan kebijakan harus bebas dari kepentingan.

Dalam filsafat kebijakan (filosofi kebijakan), ada konsep pemerintahan yang memiliki bentuk masyarakat plural, seperti yang ditemukan di Indonesia dan Amerika Serikat. Teori Brokerism berpendapat bahwa di setiap masyarakat pasti ada beberapa kelompok kepentingan, dan pemerintah berfungsi "sebagai alat perekat" untuk menggabungkan semua elemen kelompok kepentingan itu menjadi kekuatan yang terintegrasi. Mengingat fungsi filsafat politik yang disebutkan di atas, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan dalam demokrasi adalah wajib.

Selain itu, UU 32/2004 tentang pemerintah daerah mengatur peran masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah memiliki wewenang untuk mencatat, mencatat, mengumpulkan, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, seperti yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 139, yang menyatakan bahwa rakyat berhak untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan atau tertulis mengenai penyusunan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Hal ini menjamin bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam penjabaran kebijakan publik di daerah mereka, sehingga kebijakan publik berjalan sesuai dengan rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi di antara orang-orang yang kuat untuk mempertahankan negara.

Beberapa indikator berikut dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan Gen Z dalam proses pembuatan kebijakan publik: Pertama, orang menggunakan media sosial untuk berbicara tentang masalah pemerintahan yang sedang terjadi dan mencari solusinya; kedua, orang membuat jurnal atau blog untuk mencari tahu apa masalah yang viral di daerah tempat tinggal tetapi tidak ditangani oleh pemerintah, kemudian memviralkannya agar menjadi ladan; dan ketiga, orang membuat jaringan pertemanan di dunia nyata untuk saling berinteraksi dan berdebat tentang masalah tersebut. Keempat, Generasi Z berusaha menerapkan prinsip pemilu yang inklusif dan transparan untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis yang mempertimbangkan kepentingan semua kelompok. Mereka sering mengadvokasi tujuan ini dan mendorong partisipasi pemilih yang lebih luas dan inklusif melalui aktivisme online dan media sosial.

Generasi Z memiliki peluang besar untuk mempengaruhi masa depan politik yang lebih progresif dan inklusif jika mereka berpartisipasi secara aktif dan memberikan suara berdasarkan informasi. Dengan terlibat dalam proses politik, mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi agenda politik dan meminta perubahan yang mereka inginkan. Pendapat-pendapat ini mewakili keprihatinan sosial dan politik khusus Generasi Z, dan mereka sering mencari cara baru dan progresif untuk terlibat dalam politik dan pemilu pada umumnya. Ini adalah ekspresi dari keinginan dan keinginan mereka untuk melakukan perubahan yang mereka anggap akan berdampak pada masa depan mereka. (Choeriyah & Assyahri, 2024)

Untuk saat ini, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik adalah relatif baru. Misalnya, yang paling mendapat perhatian adalah ketika Barac Obama, kandidat presiden Amerika Serikat, dan timnya menggunakan media baru untuk menyebarkan informasi tentang program dan kegiatan kampanyenya dalam upaya mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat Amerika. Ketika pemilihan presiden Republik Indonesia 2014 berlangsung, media sosial menjadi alat komunikasi politik yang paling populer di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di negara ini, jumlah media sosial yang tersebar luas di internet selama kampanye pemilihan presiden 2014 terkait.

Banyak penelitian dilakukan melalui media internet karena masalah yang dihadapi, yaitu kesulitan menghadapi era digital modern dan bagaimana menentukan strategi yang tepat untuk survive di era digital modern. Pada zaman sekarang, sosial media telah berkembang menjadi salah satu alat promosi yang paling efektif, yang dapat dengan cepat menjangkau masyarakat luas dan tidak membutuhkan banyak biaya kecuali untuk fitur berbayar, yang akan dibahas lebih lanjut. Akibatnya, ini menjadi masalah yang cukup signifikan bagi perusahaan. Bagaimana bisnis dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan meskipun pimpinan dan karyawannya tidak mahir menggunakan sosial media

Selanjutnya, pimpinan perusahaan dalam bidang ekonomi dan manajemen perusahaan tidak mempelajari media sosial kontemporer secara menyeluruh. Disebabkan fakta bahwa perusahaan telah beroperasi selama lebih dari satu dekade, meskipun media sosial kontemporer baru populer muncul pada awal tahun 2010. Bagaimanakah perusahaan menghadapi perubahan sistem itu agar tetap bertahan? Berikut ini adalah beberapa platform media sosial yang akan dibahas dan digunakan untuk mempromosikan bisnis:

1. Instagram
2. Facebook
3. Website
4. Youtube
5. Twitter
6. Blog

(Januar et al., n.d.)

## KESIMPULAN

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembangunan regulasi yang efektif, peningkatan literasi digital dan politik masyarakat, pendidikan politik yang berkualitas, kerja sama internasional yang erat, serta pengembangan teknologi yang berbasis etika. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat memastikan bahwa era digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan, bukan sebagai sumber. (Laowe, n.d.)

Di era digital, media sosial memainkan peran penting dalam dinamika opini publik dan partisipasi politik. Beberapa contohnya termasuk perubahan cara orang berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan terlibat dalam kehidupan politik. Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia, penggunaan teknologi dan media sosial memiliki dampak yang signifikan. Penggunaan teknologi dan media sosial memungkinkan partisipasi yang lebih luas, akses informasi politik yang cepat, mobilisasi aktivisme politik, dan peningkatan transparansi dalam proses demokrasi. Namun, penggunaan ini juga membawa risiko seperti penyebaran misinformasi, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam mengatur, melindungi privasi, meningkatkan literasi media, dan menangani konten negatif. Dengan menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko, Penelitian ini telah menganalisis dinamika kampanye politik di era digital dengan fokus pada strategi gimik media sosial yang digunakan oleh Prabowo Gibran dalam Pemilu 2024. Temuan menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi saluran utama bagi para kandidat untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda, dan membangun citra positif. Strategi gimik media sosial yang digunakan oleh Prabowo Gibran, seperti meme, video pendek lucu, dan

konten interaktif, terbukti efektif dalam menarik perhatian pemilih dan menciptakan engagement yang tinggi. Konten-konten ini berhasil menjadi viral dan membantu membangun citra Prabowo Gibran sebagai kandidat yang dekat dengan generasi milenial dan mengikuti tren digital.

Penggunaan strategi gimik media sosial juga memiliki potensi risiko, seperti persepsi negatif atau kontroversi yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan citra kandidat. Oleh karena itu, tim kampanye harus berhati-hati dalam mengelola strategi ini dan memastikan keseimbangan antara kreativitas dan integritas. Media sosial juga berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kandidat. Dengan menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko, Indonesia dapat memanfaatkan potensi teknologi dan media sosial untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang inklusif, transparan, dan responsif. (Perusahaan, 2024) (Arsyad Arsyad et al., 2024) (Juleha et al., 2024)

Pengaruh aktivis mahasiswa dalam perubahan sosial politik di era digital 5.0 menyoroti peran krusial yang dimainkan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan dalam konteks zaman yang terhubung secara digital ini. Karena teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari di era digital 5.0, aktivis mahasiswa telah mampu secara efektif mengatur aksi politik dan sosial dalam skala yang lebih besar dengan menggunakan platform digital untuk mengumpulkan dukungan dan menyebarkan informasi. Melalui media sosial dan platform internet, mereka dapat dengan cepat memobilisasi masyarakat dan menarik perhatian pada topik-topik penting seperti kesetaraan gender, perubahan iklim, dan hak asasi manusia dalam skala dunia. Di era digital 5.0, aktivis mahasiswa juga bisa lebih berhasil menantang kekuatan yang ada dengan menggunakan taktik digital termasuk kampanye online, petisi digital, dan gerakan boikot online, selain melakukan demonstrasi fisik di ruang publik. Mereka dapat segera bereaksi terhadap perkembangan peristiwa politik dan sosial serta merencanakan protes dan kegiatan kerja sama dalam skala lokal dan internasional karena mereka memiliki akses langsung terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dengan melakukan hal ini, aktivis mahasiswa tidak hanya mendorong perubahan sosial dan politik tetapi juga menciptakan model baru tentang bagaimana gerakan sosial harus berfungsi di era digital dan membuat perbedaan besar.

(Boestam et al., 2023)(Hanita, 2023) mereka berpotensi menjadi kekuatan yang kuat untuk melakukan perubahan dalam politik dan masyarakat berkat jumlah pemilih yang besar. Pemerintah hendaknya memberikan ruang yang lebih luas agar generasi muda dapat memiliki wadah dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam keterlibatan proses pembuatan kebijakan publik. Karena sejatinya, pola pikir yang dimiliki generasi muda masih sangat dibutuhkan dan dapat menjadikan suatu keputusan yang lebih inklusif dan responsive. (Choeriyah & Assyahri, 2024)

## DAFTAR PUSTAKA

- Boestam, A. B., Prakosa, A., & Avianto, B. N. (2023). Upaya Partai Politik Dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual Di Era Digital. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i1.2281>
- Fachrusi, M. (2023). Kesenjangan Digital dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial: Suatu Analisis Sosio-Politik. *Literacy Notes*, 1(2), 1–11.
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Mita Choerunissa. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 362–371. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/43>
- Hanita, M. (2023). Transformasi Ketahanan Wilayah pada Era Digital: Peran Kepemimpinan Digital dalam



- Membangun Smart City di Kota Pariaman Sumatera Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 199. <https://doi.org/10.22146/jkn.86067>
- Hia, E. F. (2021). *Komunikasi politik di era digital*. 01(01), 6–18.
- Januar, D., Nizomi, S., Hidayat, T., & Nur, A. (n.d.). *Strategi Komunikasi Kepemimpinan Pada Era Digital*.
- Laowe, S. S. (n.d.). Tantangan Etika Politik Dalam Era Digital : Perspektif Sosial dan Teknologi. *Literacy Notes*, 1–11.
- Majid, M. nurcholi. (2023). *Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Di Era Digital*. 2(November), 53–61.
- Melsya Dwi Putri, Emilia Susanti, Lara Santri, Nopalia Susanti, Rasti Ananda, & Daimatussalimah Daimatussalimah. (2024). Analisis Dampak Perilaku Online Gen Z Terhadap Identitas Kewarganegaraan Dalam Era Digital. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 211–223. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3300>
- Ningtyas, A. (n.d.). *PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI ERA DIGITAL* : 1–11.
- Nur Fadilla, A., Safitri Agustina, R., & Aulia Syafikarani, F. (2024). Dinamika Perubahan Sosial dan Politik di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 17–23.
- Peramesti, N. P. D. Y., & Kusmana, D. (2018). Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 73–84. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.413>
- Waluyo, D. (2019). Pemahaman Komunikasi Politik Pada Era Digital. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(2), 160–167. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.63>
- Wasistiono, S. (2019). ASPEK PEMERINTAHAN dan PERUBAHAN KOMPREHENSIF ERA DIGITAL. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 1–16. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.350>